

BAB I

PENDAHULUAN

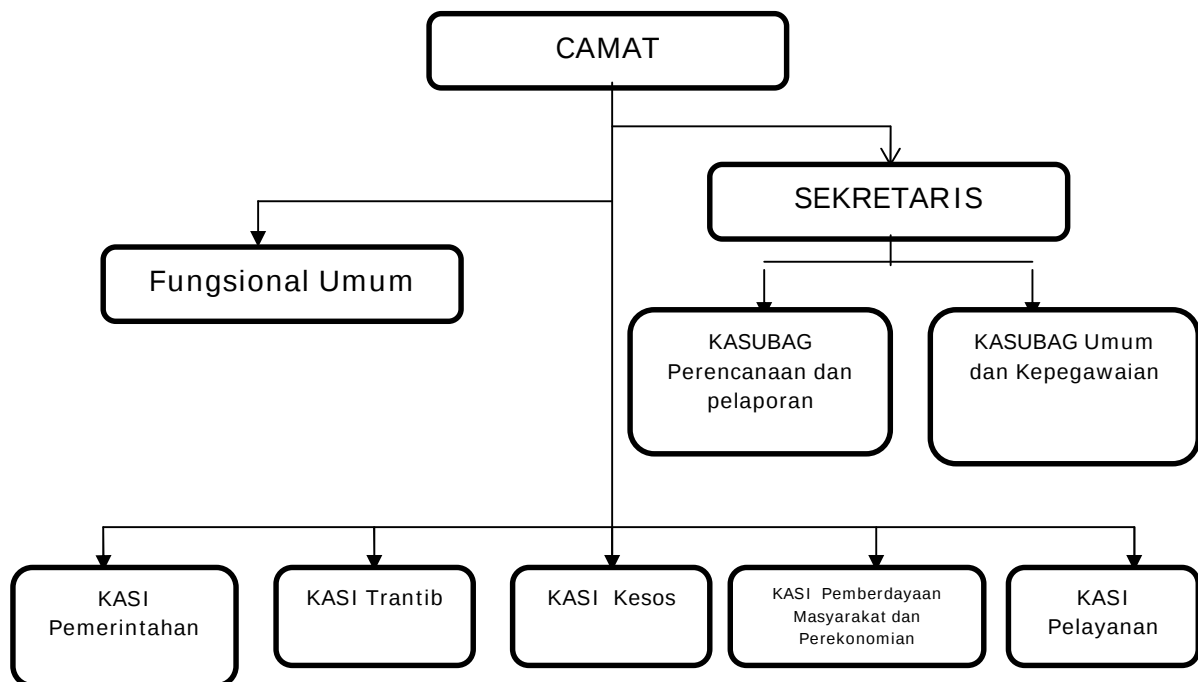
Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan struktural di Lingkungan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Camat Lengayang adalah instansi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

Kantor Camat Lengayang dipimpin oleh seorang Camat (Eselon IIIa), dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IIIb, 5 (Lima) orang Pejabat Struktural Eselon IVa dan 2 (Dua) orang Pejabat Struktural Eselon IVb, yaitu:

1. Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Trantib
6. Seksi Pelayanan.

Struktur Organisasi Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LENGAYANG



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disampaikanlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Rancangan Peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil

(outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 4.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5.Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 6.Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10.Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
- 11.Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2011 tentang APBD
- 12.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab, setiap bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan

4.2. Basis Akuntansi

4.3. Basis Pengukuran

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat Penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/ pengusulan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kecamatan, Kantor Camat Lengayang diharuskan mampu menyelenggarakan kewenangan urusan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan langkah :

- a) Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan menerapkan Sistim Pelayanan Minimal
- b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur keuangan dan tenaga kepegawaian
- c) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Nagari
- d) Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan di bidang pengeluaran digunakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan seperti ;

- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran SKPD
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk pelayanan masyarakat.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Program kerja Kantor Camat Lengayang pada Tahun anggaran 2018 yang telah di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 mencapai target sasaran sebesar 92.20 %. Dengan besaran Anggaran Rp. 1.140.997.800,

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/ kegiatan unit kerja se sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program/ kegiatan. Di samping itu juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektif dan efisien) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kantor Camat Lengayang sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk table atau grafik berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	KET
1	2	3	4	5
Sasaran : Prosentase tersedianya jasa administrasi perkantoran	223.813.506	216.171.060	95 %	
Program Pelayanan Administrasi Per- kantoran				
o Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.180.000	3.180.000	100%	
o Penyediaan Jasa administrasi keuangan	80.850000	79.700.000	98%	
o Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.843.946	14.948.324	94,35%	
o Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000,	2.870.000,	75,67%	
o Penyediaan alat tulis kantor	17.425.812,	17.142.521,	98,37%	
o Penyediaan barang cetakan & penggandaan	12.490.128,	7.894.675,	63,21%	
o Penyediaan komponen instalasi listrik / pe nerangan bangunan kantor	4.653.620	4.653.240,	99,99%	
o Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2.880.000,	2.880.000,	100%	
o Penyediaan makanan dan minuman	24.750.000,	24.750.000	100%	
o Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	18.000.000,	17.972.300,	99,8%	
o Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.740.000,	40.180.000,	98,63%	
Sasaran : Prosentase tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	84.718.894	84.638.194	79,92 %	
Program Peningkatan Sarana dan Prasa rana Aparatur				
o Pengadaan peralatan gedung kantor	42.747.823,	42.747.823	100%	
o Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6.149.071	6.149.071	100%	
o Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	20.622.000,	20.541.300,	100%	
o Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0	
Sasaran : Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	2.182.500	2.182.500,	100 %	

dan keuangan				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
o Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2.182.500	2.182.500	100%	
Sasaran : Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	17.295.000	9.725.000,	56,23 %	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
o Pelaksanaan Upacara HUT RI	9.725.000,	9.725.000,	100%	
o Peningkatan kompetensi kelembagaan KAN	7.570.000,	0	0%	
Sasaran : Prosentase pemberantasan penyakit masyarakat	9.750.000	2.250.000,	23 %	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)				
o Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	9.750.000,	2.250.000,	23%	
Sasaran : Prosentase pengembangan pemasaran pariwisata	10.340.000,	10.340.000,	100 %	
Program pengembangan pemasaran pariwisata				
o Pergelaran seni budaya dan potensi daerah	10.340.000,	10.340.000,	100%	
Sasaran : Prosentase terselenggaranya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan nagari	9.600.000,	9.600.000	100 %	
Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan nagari				
o Monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan (sesuaikan dengan RKA Pemerintah Nagari)	9.600.000,	9.600.000,	100%	
Sasaran : Prosentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	670.550.000,	670.550.000,	87,24 %	
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial				
o Penunjang kegiatan MTQ Kecamatan	55.275.000,	54.992.500,	99,49%	
o Peningkatan kegiatan keagamaan (didikan subuh wirid remaja)	7.500.000,	5.625.000,	75%	
o Penunjang kegiatan MTQ Kabupaten	607.775.000,	607.775.000,	100%	
Sasaran : Prosentase pembangunan wilayah Kecamatan	112.747.900,	105.767.900,	96,13 %	
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan				
o Pembinaan PKK Kecamatan	53.850.000,	48.525.000,	90.11%	
o Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	8.500.400,	8.500.000,	100%	
o Perencanaan Pembangunan Kecamatan	8.450.000,	8.450.000,	100%	
o Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayaan	10.800.000,	10.200.000,	94,44%	
o Fasilitas kegiatan kepemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan	9.700.000,	9.655.000,	99,54%	

o Lomba K3 dan Taman sekecamatan	5.692.500,	5.312.500,	93,32%	
o Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	7.505.000,	6.875.000,	91,61%	
o Pembinaan Pramuka kecamatan	8.250.000,	8.250.000,	100%	
Jumlah	1.140.997.800	1.109.067.154,	97,20 %	

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target antara lain :

1. Perubahan system pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman lebih bagi aparat pengelola keuangan dan Sistim Informasi Keuangan Daerah.
2. Sebagian ASN ada yang belum mahir dalam melaksanakan program yang di rencanakan
3. Adanya beberapa kegiatan kabupaten yang dilaksanakan di kecamatan Lengayang, yaitu :
 1. Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 103 Tahun 2018
 2. Kegiatan MTQ Ke 39 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Disamping itu kecepatan kerja peralatan juga sangat menentukan dalam pencapaian target, seperti masalah jaringan, meskipun sudah bisa diakses dari kecamatan , tetapi kerjanya cukup lambat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan). Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh PPKD yang dalam hal ini diemban oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun program dan kegiatan TA. 2018 pada Kantor Camat Lengayang adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5	Penyediaan Alat tulis Kantor
6	Penyediaan barang cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Kantor
8	Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan

9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12	Pengadaan Peralatan Gedung kantor
13	Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah dinas
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
15	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional
C	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja OPD
E	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
18	Pelaksanaan Upacara HUT RI
19	Peningkatan Kompetensi KAN
F	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
20	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
G	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
21	Pelaksanaan Pameran/Bazar Festival Langkisau
H	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Nagari
22	Monotoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Pemerintahan Nagari
I	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23	Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan
24	Peningkatan Kegiatan Keagamaan (Didikan Subuh Wirid Remaja)
J	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

25	Pembinaan PKK Kecamatan
26	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong
27	Perencanaan Pembangunan Kecamatan
28	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
29	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
30	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan,Keagamaan dan Kemasyarakatan
31	Lomba K3 dan Taman Se-Kecamatan
32	Pembinaan Pramuka Kecamatan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basic) dan Basis Akrua (Accrual Basic). Pada Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas bendaharawan. Basis Kas dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua dipergunakan dalam penyusunan Neraca dimana asset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu basis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrua dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan berbasis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (asset, kewajiban dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai asset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Asset harus dicatat/ diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat/ diukur

sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/ diukur sebesar selisih antara asset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Contoh :

- Pencatatan aset berdasarkan harga perolehan.

Telah sesuai standar akuntansi pemerintah

- Terhadap asset daerah belum dilakukan penyusutan.

Belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

1. Belanja

a) Belanja Pegawai

Dianggarkan sebesar Rp. 2.014.438.861,- sampai 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 1.984.360.556,- (98,50 %) dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 2. Rincian Belanja Pegawai

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG	1.933.588.861.	1.904.660.556
Gaji dan Tunjangan	1.387.147.861.	1.370.368.956
Tambahan Penghasilan PNS	546.441.000	534.291.600.
BELANJA PEGAWAI LANGSUNG	80.850.000	79.700.000
. Honor PNS	42.000.000	41.600.000
Honorarium Non PNS	38.850.000	38.100.000
Total Belanja Pegawai	2.014.438.861.	1.984.360.556.

b) Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan sebesar Rp. 1.083.049.977,- terealisasi sebesar Rp. 1.018.144.331,- (94.%) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai	40.743.378.	37.914.085
2	Belanja Bahan/ Material	18.950.471.	16.750.471.
3	Belanja Jasa Kantor	126.360.000	112.160.000.
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.622.000.	19.941.300

5	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.145.528.	22.070.075
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung	-	-
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.200.000	48.200.000
8	Belanja Makanan dan Minuman	415.440.000	39.297.750.
9	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000	35.000.000
10	Belanja Perjalanan Dinas	78.940.000	74.552.300
11	Belanja Pemeliharaan	3.000.000	2.870.000
12	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai	0	0
13	Belanja Jasa pihak ketiga	0	0
	Jumlah	1.083.049.97.	1.018.144.331

c) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp. 57.947.823,- terealisasi sebesar Rp. 53.947.823,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja modal pengadaan alat Rumah Tangga.	33.200.000	29.200.000
2	Belanja modal pengadaan Komputer	7.340.323.	7.340.323
3	Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja /Rapat Pejabat	17.407.500.	17.407.500.
	Jumlah	57.947.823.	53.947.823.

2. Aset

1) Aset Lancar

Kas pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah Rp.0,- karena UYHD per 31 Desember 2018 sebesar Rp.25.000. ,- telah disetor pada tanggal 28 Desember 2018 yang terdiri dari pengembalian sisa UP sebesar Rp. 25.000.-

Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 54.000,- yang berarti pengelolaan persediaan sudah sangat baik.

2) Aset Tetap

✓ Tanah

Saldo Awal tanah tahun 2018 sebesar Rp. 302.076.157,- dan sepanjang tahun 2018 tidak ada perubahan saldo tanah.

✓ Peralatan dan Mesin

Saldo awal Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebesar Rp. 481.520.431,-. Selama TA 2018 terdapat penambahan mutasi sebesar Rp.53.947.823,- sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 menjadi Rp. 53.947.823,-

✓ Bangunan dan Gedung

Tidak terdapat perubahan saldo bangunan dan gedung sepanjang TA 2018 sehingga tetap sama dengan saldo awal tahun 2015 sebesar Rp.208.000.000,-

✓ Aset Tetap Lainnya

Saldo awal tahun 2018 Rp. 629.167,- dan sepanjang tahun 2018 tidak ada perubahan, sehingga saldo per 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp. 629.167,-

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di tahun 2018 kita mengkaji lebih efektif dan efisien melalui perhitungan surplus/ defisit.

URAIAN EKUITAS DANA	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
EKUITAS DANA LANCAR	3.0746.805.150.13610	
Silpa	(814.644.716.)	
Surplus/ Defisit	(2.976.752.710.)	(814.644716.)
EKUITAS DANA INVESTASI	2.976.752.710.	
Diinvestasikan dalam asset tetap	2.976.752.710.	0
EKUITAS DANA UNTUK	3.013.752.710.	0
DIKONSOLIDASIKAN	3.013.752.710.	
RK PPKD		
Jumlah Ekuitas Dana	6,805.150.136.	814.644.716

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari uraian CaLK SKPD Kantor Camat Lengayang per 31 Desember 2018 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan atau kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2017. Hanya ada sedikit kendala dalam jarak dan jaringan SIPKD, meskipun bisa diakses dari kecamatan, tetapi proses aksesnya agak lambat .

6.2. Saran

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk tahun-tahun yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intens tentang aturan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, terlebih bagi aparatur yang masih baru di bidang keuangan.

KAMBANG, 30 Januari 2019
CAMAT LENGAYANG



ZONI ELDO.SSTP.MA.
Nip. 198410082003121003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SOPD Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana posisi keuangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Anggaran Rp.3.074.586.661.,-
- Jumlah SP2D Rp. 3.013.727.710,-
- Jumlah Realisasi Rp 3.013,727.710.
- UYHD Rp. 25.000-
- Contra Post Rp. ,- 500.000.

KAMBANG, 30 Januari 2019
CAMAT LENGAYANG



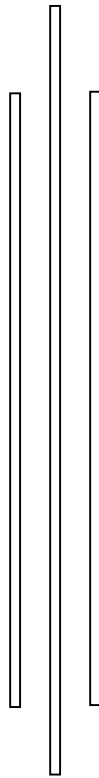
ZONI ELDO SSTP.MA.
Nip. 198410082003121003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
2.1. Ekonomi Makro.....	6
2.2. Kebijakan Keuangan.....	6
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	8
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja.....	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	11
4.1. Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan.....	11
4.2. Basis Akuntansi.....	13
4.3. Basis Pengukuran.....	13
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	14
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	15
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos.....	15
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	19
6.2. Saran.....	19



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**KECAMATAN LENGAYAG
TAHUN ANGGARAN 2018**